

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2023. Sampel yang digunakan terdiri atas 61 Kementerian/Lembaga Negara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat Kesimpulan sebagai berikut :

1. **Pengadaan Barang/Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.** Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada lingkungan Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia tidak hanya terpaku dengan perencanaan dan pengukuran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, melainkan selalu disesuaikan dengan revisi DIPA. Pada penelitian ini operasional variabel pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah indeks maturitas UKPBJ sesuai dengan Peraturan LKPP No.10 Tahun 2021 sehingga evaluasi penilaiannya belum berjalan dengan efektif.
2. **Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.** Dalam pelaksanaannya, ada atau tidaknya reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga Negara di Indonesia tidak mempengaruhi penyerapan anggaran karena pada akhirnya pemakaian anggaran akan dimaksimalkan sesuai dengan pagu anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun

anggaran. Selain itu, Reformasi birokrasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem administrasi dalam jangka panjang, sehingga dampak dari reformasi birokrasi terhadap penyerapan anggaran belum terlihat pada tahun penelitian ini.

3. **Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.** Semakin tingginya akuntabilitas publik mencerminkan semakin baiknya tata kelola pemerintahan yang diterapkan sehingga dapat mendorong efektivitas penyerapan anggaran. Sejalan dengan teori birokrasi terkait *value-rational action*, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan berorientasi pada tujuan dan pencapaian yang realistis. Transparansi publik dapat mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan agar anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.** Pada pelaksanaannya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memiliki hubungan langsung dengan penyerapan anggaran karena lebih berfokus pada fungsi pengawasan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan. Selain itu, implementasi dari sistem pengendalian intern di Kementerian dan Lembaga Indonesia masih belum optimal sehingga dampaknya terhadap penyerapan anggaran tidak akan terlihat secara signifikan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat implikasi teoritis dan praktis yaitu:

5.2.1 Implikasi Teoritis

Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran seperti faktor kompetensi sumber daya manusia, politik, kondisi ekonomi, serta mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori birokrasi, khususnya terkait *value-rational action* yang menekankan orientasi pencapaian tujuan dalam pengelolaan anggaran. Temuan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran mendukung konsep bahwa transparansi dan tanggung jawab publik memainkan peran penting dalam efektivitas birokrasi.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penyerapan anggaran di lingkungan pemerintahan, seperti:

1. Menjadi acuan perbaikan dalam sistem perencanaan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, terutama dalam kaitannya dengan revisi Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) serta peningkatan efektivitas pada penilaian indeks maturitas UKPBJ agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih sesuai.

2. Menjadi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat mendukung efektivitas realisasi anggaran, misalnya melalui penyesuaian kebijakan reformasi birokrasi dengan sistem penganggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan.
3. Menegaskan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan harus menjadi prioritas karena memiliki dampak positif terhadap efektivitas penyerapan anggaran.
4. Menjadi evaluasi bagi sistem pengendalian intern pemerintah untuk diperkuat agar dapat mendukung efektivitas pengelolaan anggaran melalui peningkatan dalam kapasitas pengawasan dan evaluasi kebijakan, serta optimalisasi peran SPIP dalam mendorong kepatuhan terhadap prosedur anggaran yang lebih ketat dan akurat. Fungsi pengawasan pada SPIP juga sangat diperlukan untuk memastikan agar penyerapan anggaran tidak hanya sebatas pemenuhan angka realisasi penggunaan anggaran, melainkan juga dalam penggunaannya untuk memenuhi program kerja yang sesuai dengan rencana strategis pemerintah.
5. Temuan pada penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan peran lembaga pengawas dan pelaksanaan tata kelola dalam memaksimalkan operasional yang ada pada masing-masing instansi pemerintahan agar menjadi lebih maksimal.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk membantu menginterpretasikan hasil temuan, yaitu:

1. Objek pada penelitian ini hanya terbatas pada data tahun 2023, sehingga belum menggambarkan keseluruhan bagaimana pengaruh pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penyerapan anggaran.
2. Indikator pengukuran yang digunakan pada penelitian ini merupakan sebuah peraturan yang ditetapkan kurang dari 5 tahun yang mana belum dapat dikatakan efektif sehingga bisa mempengaruhi hasil dari penelitian.
3. Variabel independen dalam penelitian ini hanya meliputi 4 variabel yaitu pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga belum menunjukkan keseluruhan aspek yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

5.4 Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pada penelitian ini, berikut rekomendasi untuk peneliti selanjutnya :

1. Melakukan perbandingan antar tahun untuk melihat bagaimana pengaruh pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap penyerapan anggaran.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran disarankan agar mempertimbangkan

variabel-variabel tambahan diluar variabel pada penelitian ini seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Anggaran.

3. Peneliti yang tertarik untuk meneliti dengan variabel pengadaan barang/jasa dan reformasi birokrasi dengan indikator peraturan yang ditetapkan sebaiknya melakukan penelitian ketika peraturan telah berjalan dengan efektif sehingga menambah keabsahan hasil penelitian.
4. Menambahkan variabel kontrol atau variabel moderasi untuk melihat bagaimana pengaruh pengadaan barang/jasa, reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah setelah ditambahkan variabel kontrol atau moderasi tersebut.
5. Melakukan eksplorasi pada objek penelitian seperti dengan menggunakan data pemerintah daerah atau pemerintah kota sebagai populasi untuk melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan pada instansi pemerintahan tersebut.

